

Analysis of the Influence of Poverty Rates, Open Unemployment Rates, Economic Growth and District Minimum Wages on Human Development Index in the Province of West Java in 2016-2020.

Luky Indriani ¹ , Muhammad Arif ²

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhamamdiyah Surakarta

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammdiyah Surakarta

*Email: b300180022@student.ums.ac.id

Abstract

The purpose of this study was to determine the direction and magnitude of the influence of poverty levels, open unemployment rates, economic growth and district minimum wages on the Human Development Index (IPM) in West Java Province in 2016-2020. This research is a quantitative tool used is panel data regression analysis with the selected model FEM (Fixed Effect Model). Based on the results of panel data regression, a it is explained that the Poverty Level has a negative effect on the Human Development Index, the Regency Minimum Wage has a positive effect on the Human Development Index, while Economic Growth and the Open Unemployment Rate have no effect on the Human Development Index in West Java Province.

Keywords: Human Development Index; Poverty Level; Open Unemployment Rate; Economic Growth; District Minimum Wages

Analisis Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Kabupaten Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arah dan besarnya pengaruh tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi dan upah minimum kabupaten terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat tahun 2016-2020. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Alat penelitian yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan model terpilih FEM (*Fixed Effect Model*). Berdasarkan hasil regresi data panel dijelaskan bahwa Tingkat Kemiskinan (TK) berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Upah Minimum Kabupaten (UMK) berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sedangkan Pertumbuhan Ekonomi (PE) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Jawa Barat

Kata Kunci: Indeks pembangunan manusia, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, upah minimum kabupaten.

1. Pendahuluan

Pembangunan manusia adalah seluruh proses atau usaha dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan masyarakat kearah yang lebih baik dan terus berkembang, pada suatu wilayah secara berkala dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk menghadapi berbagai tantangan perkembangan teknologi yang semakin maju dan pesat. Dalam upaya meningkatkan pembangunan kualitas sumber daya manusia diperlukan suatu perencanaan secara berkelanjutan seperti dalam hal pembangunan agama, budi pekerti, kesehatan, kesejahteraan sosial serta pendidikan, selain itu kelautan dan kedirgantaraan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam upaya pembangunan kualitas sumber daya manusia, sebagai insan yang mandiri dan sumber daya pembangunan (Effendi, 2017).

Menurut *United Nation Development* (UNDP) yang dikenalkan oleh Amartya Sen dan Mahbub UL Haq pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala yang ditunjukkan dengan adanya laporan tahunan *Human Development Report*. Dengan tujuan untuk menekankan bahwa pentingnya manusia beserta sumber daya yang dimiliki dalam pembangunan manusia. *Human Development Indeks* dengan kata lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan salah satu cara untuk mengukur perkembangan dalam pembangunan manusia. IPM memberikan suatu pencapaian pembangunan yang lebih baik karena tidak hanya mengukur capaian ekonomi semata, tetapi juga mencakup berbagai bidang seperti dalam kebahagiaan, kesehatan, dan adanya kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang luas. Angka yang ada dalam IPM merupakan gabungan dari 3 (tiga) dimensi utama antara lain umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan menggunakan Angka Harapan Hidup (AHH), dalam bidang pendidikan diukur dengan menggunakan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Standar Hidup Layak yang dapat diukur dengan menggunakan Tingkat Pendapatan Perkapita (Dartanto, 2020).

Provinsi Jawa Barat memiliki 18 kabupaten dan 9 Kota. Daerah ini menjadi salah satu titik fokus dalam perkembangan kualitas hidup manusia. Berdasarkan data yang dimuat Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat tahun 2020, daerah ini memiliki jumlah penduduk yaitu sebesar lebih dari 49 juta jiwa. Dengan banyaknya jumlah penduduk maka daerah ini memiliki sebuah aset berharga, Sumber Daya manusia yang berkualitas menjadi modal dasar dalam pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat dan juga pembangunan nasional.

Selain Indeks Pembangunan Manusia dalam hal ini diperlukan adanya pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat dan pendapatan yang didistribusikan secara merata, dengan ini pembangunan dalam suatu daerah/wilayah dapat diarahkan ke dalam 3 hal pokok antara lain meningkatkan pendistribusian dan ketersediaan kebutuhan pokok bagi masyarakat, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan meningkatkan kemampuan masyarakat sekitar dalam berbagai kegiatan sosial dalam kehidupannya (Maratade et. al, 2016). Bukan hanya pertumbuhan ekonomi namun perlu diperhatikan juga masalah kemiskinan yang mengakibatkan dampak serius, dimana kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks bermula dari kemampuan daya beli masyarakat dalam mencukupi kebutuhan pokok, sehingga kebutuhan yang lain terabaikan seperti pendidikan dan kesehatan (Mirza, 2011).

Ketidakmampuan akses pendidikan, kesehatan dan lapangan kerja secara layak berdampak pada naiknya jumlah pengangguran angkatan kerja. Siklus pengangguran apabila tidak dipotong mata rantau dengan kemudahan akses pendidikan dan kesehatan

serta menciptakan lapangan pekerjaan maka akan terus menjadi siklus yang tidak pernah ada ujungnya (Faizin, 2021). Kebijakan Upah Minimum Kabupaten/Kota, masalah upah yang rendah dalam suatu daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung mengakibatkan penurunan pada kualitas manusia atau Indeks Pembangunan Manusia (Lubis, 2017).

2. Literatur Review

IPM adalah adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. HDI digunakan untuk mengklasifikasi apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Indeks ini lebih fokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekedar pendapatan per kapita yang selama ini digunakan, dan indeks ini juga berguna bagi jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih rinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya (Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik BPS, 2015).

Menurut Mulyaningsih (2008) indeks pembangunan manusia memuat tiga dimensi penting dalam pembangunan yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan akan hidup panjang umur dan hidup sehat untuk mendapatkan pengetahuan dan mempunyai akses kepada sumber daya yang bisa memenuhi standar hidup. Artinya, tiga dimensi penting dalam pembangunan manusia tersebut sangat berpengaruh terhadap kemiskinan. Lanjouw *et.al* (2001) pembangunan manusia di Indonesia adalah identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena bagi penduduk miskin asset utama adalah tenaga kasar mereka. Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas, dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan.

Teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia sehingga akan meningkatkan permintaan tenaga kerja dan penurunan pada tingkat pengangguran. Menurut teori Keynes bahwa melalui peningkatan daya beli masyarakat yang menunjukkan peningkatan dalam permintaan agregat dapat mempengaruhi kesempatan kerja. Apabila permintaan agregat rendah maka perusahaan akan menurunkan jumlah produksinya dan tidak dapat menyerap kelebihan tenaga kerja sehingga permintaan dan penawaran tenaga kerja hampir tidak pernah seimbang dan pengangguran sering terjadi. Menurut hukum Okun (Okun's Law) bahwa melalui peningkatan produktivitas yang disebabkan oleh meningkatnya indeks pembangunan manusia akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan peningkatan permintaan tenaga kerja sehingga banyak masyarakat yang dapat terserap di pasar tenaga kerja yang pada akhirnya mengurangi tingkat pengangguran (Mahroji & Nurkhasanah, 2019).

Pertumbuhan ekonomi dan IPM memiliki keterkaitan dan saling berkontribusi satu sama lain. UNDP mengungkapkan bahwa pembangunan manusia dapat berkesinambungan apabila didukung oleh pertumbuhan ekonomi. Walaupun keduanya tidak memiliki hubungan secara otomatis, namun apabila kedua hal tersebut disatukan pada satu kebijakan pembangunan yang searah, maka akan tercipta suatu kekuatan yang

dapat saling mendorong. Sehingga pertumbuhan ekonomi sangat efektif untuk memperbaiki pembangunan manusia (Anggraini & Muta'ali, 2013).

Tujuan utama ditetapkan upah minimum adalah untuk memenuhi standar hidup minimum seperti untuk kesehatan, efisiensi, dan kesejahteraan pekerja. Selain itu, tujuan ditetapkan upah minimum adalah untuk pemerataan pendapatan, peningkatan daya beli pekerja, dan perluasan kesempatan kerja. Semakin tinggi upah minimum regional suatu daerah menunjukkan semakin tinggi tingkat ekonominya. Oleh karena itu, upah minimum regional menjadi salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Peningkatan upah minimum akan yang meningkatkan daya beli masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan indeks pembangunan manusia (Syam & Wahab, 2015).

3. Metode

3.1 Sumber Data

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 27 kabupaten/kota, serta menggunakan data yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik untuk tingkat kemiskinan, tingkat penganggura terbuka dan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan upah minimum kabupaten diperoleh dari surat keputusan gubernur Jawa Barat.

3.2 Metode Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan model ekonometrika sebagai berikut:

$$IPM_{it} = \beta_0 + \beta_1 TK_{it} + \beta_2 TPT_{it} + \beta_3 PE_{it} + \beta_4 \log UMK_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

- IPM** = Indeks Pembangunan Manusia (persen)
- TK** = Tingkat Kemiskinan (persen)
- TPT** = Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)
- PE** = Pertumbuhan Ekonomi (persen)
- UMK** = Upah Minimum Kabupaten (ribu rupiah)
- β_0** = Konstanta
- $\beta_1.. \beta_4$** = Koefisien regresi variabel independen
- i*** = Provinsi ke *i*
- t*** = tahun ke *t*
- u*** = unsur kesalahan (*error term*)

3.2.1. Struktur Umum Model

1. *Pooled Regression*

Model ini mengasumsikan bahwa Z_j tidak terdapat efek spesifikasi individual. Struktur model ini sering disebut dengan *Common Effect Model* (CEM) dan dinyatakan dalam bentuk persamaan berikut:

$$y_{it} = \alpha + X'_{it} \beta + \varepsilon_{it}$$

$$i = 1, \dots, K; t = 1, \dots, T$$

dimana α adalah koefisien yang mana merupakan bilangan skalar, β adalah matriks slope berukuran $p \times 1$ dan X_{it} merupakan observasi ke-*i* dan waktu ke-*t* pada variabel penjelasan *p*.

2. *Fixed Effect*

Struktur model *Fixed Effect* merupakan model yang memperhatikan adanya keberagaman dari variabel independen menurut individu. Model *Fixed Effect* dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$y_{it} = X'_{it} \beta + \alpha_i + \varepsilon_{it}$$

dimana $\alpha_i = Z'_i \alpha$, mewujudkan semua efek yang diamati dan menspesifikasikan rata-rata kondisional yang dapat diestimasi. α_i diperlukan sebagai parameter tetap yang tidak

diketahui dan akan diestimasi. Z_i diasumsikan tidak terobservasi dan memiliki korelasi dengan variabel independen. ε_{it} adalah error yang bersifat stokastik dan terdistribusi secara independen dan identik dengan rata-rata 0 dan varian σ_ε^2 . Variabel independen x_{it} diasumsikan independen dengan error ε_{it} untuk semua i dan t .

3. *Random Effect*

Apabila efek individu Z_i tidak memiliki korelasi dengan variabel independen, maka struktur model ini dikenal dengan *Random Effect* yang modelnya dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:

$$y_{it} = X'_{it} \beta + \alpha_i + n_{it}$$

dimana:

$$n_{it} = u_{it} + \varepsilon_{it};$$

$$\alpha = E [Z'_i \alpha];$$

$$u_i = \{Z'_i \alpha - E [Z'_i \alpha]\};$$

terdapat sejumlah P variabel independen termasuk dengan konstanta. α merupakan rata-rata dari efek individual yang tidak terobservasi. u_i merupakan efek random spesifikasi untuk observasi ke- i . Dalam model ini u_i diasumsikan independen dengan ε_{it} selain itu diasumsikan pula bahwa variabel independen x_{it} independen dengan u_{it} dan ε_{it} .

3.2.2. Penyeleksian Model

1. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk mengetahui apakah model FEM lebih baik dari model CEM. Berikut merupakan statistic uji yang digunakan:

$$F \text{ hitung} = \frac{(RSS_1 - RSS_2)/(K-1)}{RSS_2/(KT-K-P)} \sim F_{(\alpha, (K-1), (KT-K-P))}$$

dimana K adalah jumlah sektor; T adalah periode waktu observasi; P adalah jumlah parameter dalam model *fixed effects*; RSS_1 merupakan *residual sum of squares common effects model*, sedangkan RSS_2 merupakan *residual sum of squares fixed effects model*.

Jika nilai F statistik F hitung lebih besar daripada F tabel $F_{(\alpha, (K-1), (KT-K-P))}$ pada α tertentu, maka model yang terpilih adalah model FEM.

2. Uji Hausman

Uji Hausman bertujuan untuk memilih antara model FEM dan model REM. Dengan mengikuti kriteria Wald, nilai statistik Hausman dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$W = x^2_{(p)} = [b - \beta]' U^{-1} [b - \beta]$$

dimana

$$U = \text{var} [b] - \text{var} [\beta]$$

b adalah parameter (tanpa intersept) *random effect* dan β adalah parameter *Fixed Effect* LSDV. $\text{var} [b]$ merupakan matriks kovarian parameter (tanpa intersept) *random effect* $\text{var} [\beta]$ adalah matriks kovarian parameter *fixed effect*.

Apabila nilai $W > x^2_{(p)}$, maka model yang terpilih adalah model FEM. P adalah jumlah variabel independen.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil Estimasi

Hasil estimasi Regresi Data Panel dengan pendekatan *Pooled Ordinary Least Squares (PLS)*, *Fixed Effect Model (FEM)* dan *Random Effect Model (REM)* dapat dilihat pada Tabel 1.1

Tabel 4.1
Hasil Regresi Data Panel Cross section

Variabel	Koefisien Regresi		
	PLS	FEM	REM
<i>C</i>	65,17183	4,160459	12,82412
<i>TK</i>	-1,143860	-0,376543	-0,454854
<i>TPT</i>	0,245080	-0,023059	-0,019625
<i>PE</i>	0,044134	-0,011019	-0,023325
<i>LOG UMK</i>	0,892464	4,769963	4,227063
R^2	0,563032	0,989818	0,690167
<i>Adjusted. R²</i>	0,549586	0,986881	0,680634
Statistik <i>F</i>	41,87608	337,0110	72,39517
Prob. Statistik <i>F</i>	0,000000	0,000000	0,000000

Sumber: Data Sekunder, diolah

4.2. Uji Chow

Uji Chow dipakai untuk menentukan model terestimasi *PLS* atau *FEM*. H_0 uji Chow: model terestimasi adalah *Pooled Least Squares (PLS)*, dan H_A -nya: model terestimasi adalah *Fixed Effect Model (FEM)*. H_0 diterima jika nilai p (p -value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik $F > \alpha$; H_0 ditolak bila nilai p (p -value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik $F \leq \alpha$. Hasil uji Chow dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Hasil Uji Chow

Statistik	Nilai	d.f	Prob.
Cross-section <i>F</i>	167,666947	(26,104)	0,0000

Sumber: Data Sekunder, diolah

Dari Tabel 4.2 terlihat nilai p (p -value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik F sebesar 0,000 ($< 0,05$), jadi H_0 ditolak. Simpulan, model terestimasi adalah *FEM*.

4.3. Uji Hausman

Uji Hausman dipakai untuk memilih model terestimasi *FEM* atau *REM*. H_0 uji Hausman: model terestimasi adalah *Random Effect Model (REM)* dan H_A -nya: model terestimasi adalah *Fixed Effect Model (FEM)*. H_0 diterima jika nilai p (p -value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik $\chi^2 > \alpha$; dan H_0 ditolak bila nilai p (p -value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik $\chi^2 \leq \alpha$. Hasil uji Hausman dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Hasil Uji Hausman

Statistik	Nilai	d.f	Prob.
Cross section random χ^2	8,369393	4	0,0789

Sumber: Data Sekunder, diolah

Dari Tabel 4.3 terlihat nilai p (p -value), probabilitas atau signifikansi empirik statistik Cross section random χ^2 sebesar 0,0789 ($< 0,10$), jadi H_0 ditolak. Simpulan, model terestimasi adalah *FEM*.

4.4. Pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap IPM

Variabel tingkat kemiskinan memiliki koefisien regresi sebesar -0.376543. Pola hubungan antara tingkat kemiskinan dengan indeks pembangunan manusia adalah linier-linier (lin-lin) sehingga apabila tingkat kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 1%, maka indeks pembangunan manusia akan mengalami penurunan sebesar 0.376543 angka indeks. Sebaliknya apabila tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 1%, maka indeks pembangunan manusia akan mengalami peningkatan sebesar 0.376543 angka indeks.

Jika tingkat kemiskinan semakin meningkat dan manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka maka akan terciptanya lingkaran setan dimana akan terlihat dari rendahnya pendapatan riil sehingga permintaan menjadi rendah, investasi rendah dan dapat mengurangi produktivitas. Selain itu, lingkaran setan juga menyangkut keterbelakangan manusia dan sumber daya alam, dimana perkembangan sumber daya alam itu tergantung pada kemampuan produktivitas manusianya. Jika tingkat kemiskinannya tinggi maka manusia tidak akan mampu untuk memperoleh pendidikan sehingga terciptalah penduduk yang terbelakang dan buta huruf sehingga kemampuan untuk mengolah sumber daya alam yang produktif tidak terpenuhi bahkan terbengkalai atau salah gunu.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mirza (2011) bahwa paradigmbangunan yang kini bergeser dari dominasi peran negara kepada peran masyarakat tidak akan dapat diwujudkan apabila tingkat kemiskinan masih tinggi. Hal demikian dikarenakan pada umumnya penduduk miskin lebih banyak menghabiskan tenaga dan waktu yang ada untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Mereka tidak tertarik untuk melibatkan diri pada aktivitas-aktivitas yang tidak secara langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Semakin tinggi tingkat kemiskinan akan menekan tingkat pembangunan manusia, sebab penduduk miskin memiliki daya beli yang rendah.

4.5. Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap IPM

Variabel Tingkat Pengangguran Terbuka memiliki probabilitas sebesar 0.7557 $> 0,10$, maka H_0 diterima dan H_A ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Tingkat Pengangguran Terbuka tidak berpengaruh terhadap IPM.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa teori pertumbuhan baru menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas manusia sehingga akan meningkatkan permintaan tenaga kerja dan penurunan pada tingkat pengangguran. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Si'lang et.,al (2019), dalam penelitiannya menyatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Hal dikarenakan kenaikan tenaga kerja dominan terjadi pada sektor yang sudah memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi dan bukan pada sektor-sektor dengan garis kemiskinan masih rendah seperti sektor pertanian.

4.6. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap IPM

Variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki probabilitas sebesar 0.7840 $> 0,10$, maka H_0 diterima dan H_A ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap IPM.

Hasil penelitian tidak sesuai dengan hipotesis awal yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap IPM. Dalam teori pertumbuhan secara jelas kaitan antara pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi dapat dipahami dari dua arah, yaitu pengaruh dari pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia dan sebaliknya (Mualan & Bowo, 2013).

Tidak berpengaruhnya pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia sejalan dengan penelitian Umiyati et.,al (2017). Dalam penelitiannya menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia karena meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat terus menerus tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM, nilai pertumbuhan ekonomi yang meningkat justru diiringi dengan kenaikan jumlah penduduk miskin.

4.7. Pengaruh Upah Minimum Kabupaten Terhadap IPM

Variabel Upah Minimum Kabupaten memiliki koefisien regresi sebesar 4.769963. Pola hubungan antara Upah Minimum Kabupaten dengan indeks pembangunan manusia adalah linier-logaritma (lin-log) sehingga apabila upah minimum kabupaten mengalami kenaikan sebesar 1%, maka indeks pembangunan manusia akan mengalami peningkatan sebesar $4.769963/100 = 0,0476$ angka indeks. Sebaliknya apabila upah minimum kabupaten mengalami penurunan sebesar 1%, maka indeks pembangunan manusia akan mengalami penurunan sebesar $4.769963/100 = 0,00476$ angka indeks.

Kenaikan kebijakan pemerintah dalam menaikkan upah minimum akan mempunyai dampak positif pada peningkatan pendapatan dalam masyarakat. Dampak dari kenaikan pendapatan yang ada di masyarakat tersebut akan berdampak pula pada kemudahan akses dari sisi pendidikan, kesehatan serta perekonomian yang dilakukan masyarakat (Faizin, 2021).

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesis awal dan juga penelitian terdahulu. Penelitian yang sejalan dengan upah minimum kabupaten berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia adalah penelitian yang dilakukan oleh Sari & Yusniar (2019) bahwa perkembangan upah minimum yang positif dari waktu ke waktu akan membawa dampak pada peningkatan pendapatan. Dengan keadaan tersebut akan dapat berakibat pada kemampuan pekerja untuk meningkatkan konsumsinya, sehingga terjadi peningkatan ekonomi secara agregat, dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkembangan upah minimum akan dapat berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

5. Kesimpulan

Pengujian menggunakan uji Chow menunjukkan bahwa model FEM lebih tepat daripada model CEM. Selanjutnya untuk hasil uji Hausman menunjukkan model FEM yang paling tepat digunakan dibandingkan dengan model REM. Oleh karena itu, penelitian ini memutuskan menggunakan model FEM. Hasil uji Koefisien Determinasi (R^2) menunjukkan dari model terestimasi dapat diketahui bahwa nilai (R^2) untuk *Fixed Effect Model* (FEM) sebesar 0.989818, artinya 98,98% variasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dijelaskan oleh Tingkat Kemiskinan (TK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Pertumbuhan Ekonomi (PE), dan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Sisanya 1,02% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa nilai signifikansi empirik statistik F pada estimasi FEM memiliki nilai 0,0000 ($< 0,01$) sehingga H_0 ditolak. Kesimpulannya adalah model yang dipakai dalam penelitian eksis. Hasil uji pengaruh (uji t) terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan bahwa Tingkat Kemiskinan berpengaruh negatif terhadap indeks pembangunan Manusia (IPM) dan Upah Minimum Kabupaten berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Pengangguran Terbuka negatif namun tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Diharapkan pemerintah dapat memilih kebijakan yang lebih efektif untuk mencapai mutu indeks pembangunan manusia yang lebih tinggi dan merata di tiap-tiap kabupaten/kota khususnya di Provinsi Jawa Barat, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan lebih banyak variabel independen agar dapat mengetahui faktor penyebab

lain dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Selain itu diharapkan peneliti menggunakan beberapa tahun lain agar dapat lebih membandingkan perbedaan dari tahun ke tahun.

Referensi

- [1] Anggraini, Rinda Ayun dan Luthfi Muta'ali. 2013. "Pola Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timr Tahun 2007-2011. *Jurnal Bumi Indonesia*. 2 (3): 233-242.
- [2] Dartanto, Teguh. 2020. "IPM, Harapan dan Tantangan Masa Depan Indonesia". Jakarta: Universitas Indonesia.
- [3] Effendi, Moch Bisyri. 2017. "Permodelan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia dengan MARS". *Stiemahardika*. 15 (3): 254-263.
- [4] Faizin, Mohammad. 2021. "Pengaruh Upah Minimum, Kemiskinan dan Pengangguran pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur". *Jurnal Samudra Ekonomi & Bisnis*. 12 (2): 214-227.
- [5] Lanjouw, P.M, Saadah H, Sayed R Sparrow. 2001. "Poverty, Educationad Health in Indonesia : Who Benefit from Public Spendig ?". World Bank Working Paper No 2739 Washington D.C: World Bank.
- [6] Lubis, Hilda Nuraeni. 2017. "Analisis Pengaruh IPM, upah dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota EKs Karesidenan Kedu, Banyumas, dan Semarang tahun 2010-2015". Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sunan Kalijaga.
- [7] Mirza, Denni Sulistio. 2011. "Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah Tahun 2006-2009." *Economics Development Analysis Jurnal*. 1 (2).
- [8] Mahroji, Dwi dan Iin Nurkhasanah. 2019. "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Pengangguran di Provinsi Banten". *Jurnal Ekonomi Qu*. 9 (1): 51-72
- [9] Maulana, Ridwan dan Prasetyo Ari Bowo. 2013. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Teknologi terhadap IPM Provinsi di Indonesia 2007-2011". *JEJAK*. 6 (2): 164-169.
- [10] Sari, Emilda dan Retty Yusniar. 2019. "Analisis Determinan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali Tahun 2010-2017". *Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan*. 4(2): 128-136..
- [11] Si'lang, Indrasuara Luther Sirangi, Zamruddin Hasid dan Priyagus. 2019. "Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia." *Indonesian Manajemen*. 11 (2): 159-169.
- [12] Umiyati, Etik, Amril dan Zulfanetti. 2017. "Pengaruh Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi dan Jumlah Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi." *Jurnal Sains Sosiohumaniora*. 1 (1): 29-37.